

POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA MASA REFORMASI (1998-SEKARANG)

Ana Kurnia Sari¹, Muhammad Sirozi²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Info Artikel :

Diterima 20 Maret 2023

Direvisi 25 Maret 2023

Dipublikasikan 30 April
2023

Kata Kunci:

Masa Reformasi,
Politik,
Pendidikan Islam

ABSTRAK

Artikel ini memuat deskripsi politik pendidikan islam masa reformasi sampai dengan saat ini dengan menggunakan pendekatan kepustakaan atau library research jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan mengumpulkan literature data yang terkait kajian mengenai politik pendidikan dengan hasil analisa sebagai berikut: Masa Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan dalam kebijakan pendidikan Islam di negara tersebut. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkuat pendidikan Islam, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kesempatan dan infrastruktur pendidikan, serta mengembangkan kurikulum pendidikan Islam inklusif. Kebijakan politik pendidikan Islam pada masa itu meliputi beberapa aspek penting. Pertama, jumlah lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, pesantren, dan pesantren meningkat. Kedua, meningkatkan guru muslim meningkat. Ketiga, perhatian lebih diberikan pada pengembangan lembaga dan infrastruktur pendidikan Islam. Keempat, tujuannya adalah mengembangkan kurikulum Islam yang inklusif. Pemerintah telah mengambil langkah konkrit untuk memperkuat pendidikan Islam, meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sarana dan prasarana, serta mengembangkan kurikulum inklusif.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Koresponden:

Ana Kurnia Sari,

Email: 2270211005_uin@radenfatah.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan suatu bangsa.(Bakry 2010) Dalam konteks Indonesia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kehidupan beragama masyarakat.(Yoga, Suarmini, dan Prabowo 2015) Bagian penting dari sistem pendidikan Indonesia adalah pendidikan Islam.(Samrin 2015) Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kebijakan pendidikan Islam sangat penting dalam konteks Indonesia.

Politik pendidikan Islam di Indonesia selama periode reformasi hingga saat ini telah mengalami perubahan dan pengembangan signifikan. (Haerullah dan Elihami 2020) Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan ditandai dengan perubahan politik yang menciptakan ruang yang lebih terbuka untuk diskusi dan partisipasi publik. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan politik yang diterapkan bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama Islam, meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta mempromosikan nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat. Salah satu kebijakan penting yang diimplementasikan adalah pengembangan program Satu Guru Satu Kelas (SGSK), (Dini 2021) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah, termasuk dalam konteks pendidikan Islam. Program ini memungkinkan satu guru mengajar satu kelas dengan jumlah siswa yang lebih sedikit, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih intens antara guru dan siswa.

Selain itu, pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. (Rosyada 2017) Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia juga mengedepankan peningkatan kualitas guru. (Bahri 2022) Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, guru pendidikan Islam diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan pengajaran, pemahaman terhadap ajaran agama, dan penguasaan metode pembelajaran yang inovatif. Peningkatan kualitas guru ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah.

Pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga menjadi fokus dalam kebijakan politik pendidikan di Indonesia. (Selamet dan Zaqiah 2022) Kurikulum pendidikan Islam diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang diperkaya dengan nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi diharapkan dapat membentuk generasi muda yang inklusif dan menghargai perbedaan agama. (Hidayat, Firdaus, dan Somad 2020) Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan program pendidikan keagamaan yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama,

mempromosikan kerukunan antaragama, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan yang memperkuat hubungan antarumat beragama.

Secara keseluruhan, politik pendidikan Islam di Indonesia selama periode reformasi hingga saat ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, memperkuat keberagaman dan toleransi, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, kebijakan politik ini memberikan harapan untuk pengembangan pendidikan Islam yang lebih baik di masa depan.(Jannah dkk. 2019)

Dalam artikel ini, akan dibahas politik pendidikan Islam di Indonesia sejak masa reformasi hingga saat ini. Makalah ini akan mengupas berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah, peran lembaga pendidikan Islam, pengembangan kurikulum pendidikan Islam, dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks politik pendidikan Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan politik pendidikan Islam di Indonesia sejak masa reformasi hingga saat ini.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang politik pendidikan Islam di Indonesia, diharapkan kita dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan solusi dalam memajukan pendidikan Islam di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan masyarakat yang berakhlak, berpengetahuan, dan toleran.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*)(Zed 2008) yakni dengan mengimpuulkan data menyatukan dari beberapa literature. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat penelitian kepustakaan atau *library research*, yang dimana hasil data diperoleh dari beberapa macam literature yang ada berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan profil lulusan lembaga pendidikan islam. Penelitian kepustakaan ini tidak melakukan penelitian dengan secara langsung kelapangan melainkan dilakukan dengan penelaahan terhadap data atau sumber informasi yang diperoleh dari teks yang masih relevan dengan kajian materi yang akan dibahas.

Pembahasan

1. Masa Reformasi 1998

Masa Reformasi 1998-Sekarang merujuk pada periode penting dalam sejarah Indonesia yang dimulai setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Masa ini ditandai

oleh perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan dalam upaya membangun demokrasi yang lebih inklusif di negara ini. (M. A. Lubis 2020) Reformasi ini bertujuan untuk mengembalikan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia yang terabaikan selama masa pemerintahan Orde Baru. Selama masa reformasi, Indonesia mengalami perubahan besar di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa perubahan penting yang terjadi di antaranya adalah penghapusan Monopoli Partai Politik, revisi konstitusi, pemilihan presiden dan legislatif langsung, dan peningkatan kebebasan pers dan hak asasi manusia. (ANZAR ABDULLAH t.t.)

Saat ini, Indonesia masih terus mengalami perkembangan di berbagai bidang. Pemerintah dan masyarakat berusaha untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perekonomian, dan memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, masih banyak masalah yang perlu diatasi, (Khaeruddin dan Rahmania 2022) seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan isu lingkungan. Era reformasi memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. (Jannah dkk. 2019) Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.

Ada beberapa poin penting terjadinya reformasi yaitu dengan runtuhnya rezim Soeharto saat tahun 1998 Indonesia saat itu mengalami krisis ekonomi yang parah hingga terjadilah protes oleh mahasiswa dan demonstrasi masa hingga Soeharto menggundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. (Sibuea 2017) Setelah lengsernya Soeharto Indonesia mengalami periode transisi menuju demokrasi adanya pemilihan umum langsung pertama diadakan pada tahun 1999, dan sejak itu, Indonesia secara berkala mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota parlemen. (Zainuddin, t.t.) Masa Reformasi menyaksikan berbagai reformasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat sistem multi-partai, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Beberapa langkah yang diambil termasuk perubahan UUD 1945, (Mirsal 2017) pengesahan undang-undang yang mengatur pemilu, dan pendirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen. Adanya kebebasan media pers dan memungkinkan munculnya berbagai media baru dan meningkatkan peran media sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Adanya upaya

mengatasi kemiskinan, kesenjangan social, dan ketidakadilan ekonomi melalui kebijakan pembangunan dan program kesejahteraan social. Membawa perubahan positif, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Korupsi, konflik etnis dan agama, ketimpangan sosial-ekonomi, serta isu-isu lingkungan menjadi beberapa isu penting yang masih harus diatasi untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

2. Perjalanan Politik Pendidikan Masa Reformasi-Sekarang

Politik pendidikan Islam di Indonesia pada masa reformasi dimulai setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dan pada masa reformasi agama pemerintah telah membuat beberapa upaya untuk memperbaiki keadaan.(Ikhwan 2017) Salah satu upaya pertama adalah pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) di Jakarta pada tahun 1998.(R. R. Lubis 2021) UIN didirikan sebagai universitas Islam terkemuka dan tumbuh menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, pada awal abad ke-21, pemerintah juga mencanangkan Program Pendidikan Agama dan Keagamaan (PAK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menyediakan kurikulum yang lebih komprehensif dan terstruktur. (Samrin 2015)

Selain upaya-upaya dari pemerintah, pada masa reformasi muncul beberapa gerakan dari masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak pendidikan Islam. Misalnya pada tahun 2002 terjadi demonstrasi yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan pendidikan Islam.(Suryana dkk. 2022) Berkat upaya pemerintah dan masyarakat sipil, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan selama masa reformasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya infrastruktur pendidikan dan konflik agama.

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan Islam yang dianggap kurang memadai pada masa Orde Baru.(Maghfuri 2020a) Beberapa kebijakan yang diterapkan adalah:

- a. Pendirian Universitas Islam Negeri – dimulai pada tahun 1998, dimana pemerintah Indonesia mendirikan Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai upaya guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. UIN menjadi lembaga

pendidikan tinggi Islam yang terkemuka dan menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.(Didi 2020)

- b. Peningkatan Anggaran - Pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran untuk semua pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Hal ini dilakukan guna memperbaiki infrastruktur dan memperluas akses pendidikan Islam di seluruh Indonesia .
- c. Program Pendidikan Anti Korupsi - Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Pendidikan Agama dan Keagamaan (PAK) pada tahun 2004.(Tantowi 2022) Dimana program ini diluncurkan dengan bertujuan guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menawarkan kurikulum yang lebih komprehensif dan lebih terstruktur.
- d. Pengembangan Sekolah Islam Internasional - Pemerintah Indonesia mendirikan sekolah Islam internasional untuk menarik siswa dari negara tetangga yang ingin belajar di Indonesia.(Indra 2016) Hal ini juga akan membantu meningkatkan reputasi pendidikan Islam di Indonesia.
- e. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia - Pemerintah Indonesia membentuk Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2004 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran wakaf dalam mendukung pendidikan Islam di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mendirikan sekolah Islam internasional untuk menarik siswa dari negara tetangga yang ingin belajar di Indonesia. Hal ini juga akan membantu meningkatkan reputasi pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, namun masih ada tantangan yang harus dibenahi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Infrastruktur pendidikan dan konflik agama di Indonesia. Secara keseluruhan, perjalanan politik pendidikan Islam di masa reformasi telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Perjalanan politik pendidikan dari masa ke masa. Masa Reformasi (1998-2004): Pada masa ini, terjadi perubahan dalam kebijakan politik dan pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan pendidikan agama Islam sebagai mata

pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum. Selain itu, lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya terpinggirkan mulai mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. (“Reformasi Indonesia (1998–sekarang)” 2023)Masa Konsolidasi (2004-2014): Pada masa ini, pemerintah fokus pada konsolidasi dan pengembangan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah. Pemerintah juga memperkuat kerjasama antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan lainnya, seperti universitas dan sekolah-sekolah umum.

Kemudian dilanjutkan masa Pemerintahan Jokowi (2014-2019): Pemerintah Jokowi memperkenalkan program unggulan yaitu wajib belajar 12 tahun, yang juga mencakup pendidikan agama Islam. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada pengembangan kualitas lembaga pendidikan Islam, melalui program sertifikasi guru dan pengadaan buku-buku pelajaran. Hingga sampai ke masa Pandemi Covid-19 (2020-sekarang): Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan pada sektor pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan agama Islam. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan cara mengadakan pembelajaran jarak jauh. Namun, program pengembangan kualitas lembaga pendidikan Islam terus berjalan, termasuk dengan meningkatkan kapasitas guru dan pengembangan kurikulum.

Secara keseluruhan, perjalanan politik pendidikan Islam sejak masa Reformasi hingga sekarang menunjukkan adanya perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pada lembaga pendidikan Islam. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam dan mengintegrasikan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan lainnya di Indonesia.

3. Kebijakan Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi-Sekarang

Negara ini dianggap sebagai negara maju dengan pendidikan yang baik. Sebaliknya, suatu negara dikatakan terbelakang jika pendidikan penduduknya sangat rendah. (Hoddin 2020) Itulah sebabnya pendidikan dan negara sebagai organisasi politik merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai aktor politik, pemerintah memegang peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kekacauan politik, artinya pasang surut iklim politik suatu negara menciptakan kondisi bagi pendidikan di negara tersebut. (Purnamawati 2020) Pendidikan dan politik sering dilihat sebagai bagian terpisah yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Padahal, keduanya saling bahu-membahu dalam membentuk karakteristik masyarakat di suatu negara. Apalagi keduanya saling mendukung dan melengkapi. Institusi dan proses pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Di setiap negara terdapat hubungan yang erat

dan dinamis antara pendidikan dan politik. Hubungan tersebut merupakan realitas empiris yang telah ada sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para peneliti. (Ma'ruf 2015)

Pendidikan seringkali dijadikan sebagai alat dan tempat untuk mengajarkan dasar-dasar yang mendukung ideologi atau kerangka politik negara. (Huda 2020) Di negara-negara Barat, Plato mulai mengkaji hubungan antara pendidikan dan politik dalam bukunya *Republic*, yang membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara serta tujuan dan metode pendidikan. Buku plato mendemonstrasikan bahwa dalam budaya helenik, sekolah merupakan kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik, gambaran adanya hubungan yang dinamis antara aktivitas kependidikan dan politik. Kedua ini merupakan dua sisi dari satu koin yang mungkin tak terpisahkan, adanya peletakan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan dikalangan ilmuan generasi berikutnya.

Eratnya hubungan antara politik dan pendidikan dalam sejarah Islam memunculkan analisis terhadap kasus Madrasah Nizamiyah, bahwa politik dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan adanya otoritas politik ini adalah guna menegakkan hukum islam yang sulit bahkan boleh jadi tak mungkin. (Hodidin 2020) Kekuasaan sebagai sarana menegakkan syariat islam, sedangkan pendidikan sendiri merupakan upaya membangkitkan kesadaran masyarakat bahaimana penerapan syariah. Tanpa adanya pendidikan orang tidak akan mengenal adanya syariah. Ketika politik sebagai pemegang kuasa berperan sebagai pelindung dari atas, maka pendidikan itu akan selalu meningkat melalui arus bawah. Paparan diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa politik pendidikan islam merupakan kebijakan yang di tetapkan oleh penguasa dari suatu pemerintahan yang terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan islam, dimana ia sebagai bagian sistem pendidikan nasional. Terkadang kebijakan itulah yang memiliki orientasi guna mempertahankan atau memperkokoh otoritas penguasa, atau malah ideologi yang dijadikan sebagai dasar pijakan.

Sejak peristiwa kebijakan moneter pada tahun 1998 yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, itu berarti berakhirnya rezim Suharto. Era reformasi itu membuka jalan menuju kebebasan berdemokrasi dalam segala aspek, yang dibatasi selama 32 tahun. Gerakan reformasi Indonesia menuntut diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dunia pendidikan, asas-asas tersebut berdampak mendasar terhadap isi, proses, manajemen, dan teknologi yang berkembang pesat dan menimbulkan tuntutan baru di segala bidang kehidupan, termasuk sistem pendidikan nasional.

Sejak istilah reformasi diulangi pada tahun 1998, banyak pengamat pendidikan mengkritisi UUSPN 1989 No. 2, mengatakan bahwa undang-undang ini tidak ada artinya dan perlu adanya perubahan undang-undang pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Pada masa reformasi tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 12(1)(a) yang berbunyi: "Setiap peserta didik pada setiap lembaga/satuan pendidikan berhak "Untuk

pendidikan. Agama menurut agama yang dianut dan diajarkan oleh ustadz yang sama” merupakan semangat baru bagi pembangunan pendidikan nasional, khususnya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

UU No. 20 Tahun 2003 di atas lebih relevan dan aplikatif, ketika pada tahun 2013 lahir konsep kurikulum yang dikenal dengan Kurikulum 2013 (KURTILAS) yang merupakan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004). tingkat satuan pendidikan. Kurikulum (2006). Ketika pada tahun yang sama dikeluarkan Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menetapkan Kompetensi Inti terkait dengan nilai KI 1 (Sikap Pribadi) dan KI 2. (Sikap sosial) – nilai pendidikan Islam, yaitu habl min Allah dan habl mi al-nas. Dinamika kebijakan (policy) pendidikan Islam pada masa reformasi yang membawa kemaslahatan besar bagi umat Islam, tidak lepas dari peran kebijakan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) yang peduli terhadap pendidikan Islam, khususnya kepada pihak-pihak yang beragama (Islam). Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dari pengajaran berbasis hafalan ke pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Kurikulum ini mencakup pendidikan agama, baik Islam maupun agama lainnya.(Bakry 2010)

Adanya peningkatan pada akses pendidikan. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)(Yusup, Ismanto, dan Wasitohadi 2019) - Program ini ditujukan untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan memberikan bantuan berupa uang tunai dan/atau subsidi biaya sekolah. Adanya kebijakan program bantuan ini tentu memberikan pengaruh dan dampak signifikan dalam dunia pendidikan, dengan pemberian bantuan ini tentu setiap anak dari kalangan kurang mampu memiliki kesempatan dalam menempuh pendidikan tanpa memikirkan biaya yang akan mereka tanggung. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Satu Guru Satu Kelas (SGSK). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan terisolasi, dengan memberikan setidaknya satu guru untuk setiap kelas di sekolah-sekolah di daerah tersebut. Kebijakan pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi di tingkat pendidikan dasar. Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi jumlah siswa dalam satu kelas dengan menempatkan satu guru untuk setiap kelas.

Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Kebijakan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur fisik sekolah dan fasilitas

pendidikan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal dan memenuhi kebutuhan siswa serta tenaga pendidik. Pemerintah berusaha meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah yang terpencil atau terpinggirkan, pembangunan ruang kelas baru untuk mengatasi kekurangan fasilitas kelas yang ada, Pemerintah juga memperhatikan peningkatan fasilitas pendukung, seperti perpustakaan, laboratorium, ruang seni, ruang olahraga, dan area permainan, Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki fasilitas sanitasi di sekolah, seperti toilet yang bersih dan sehat, pengembangan infrastruktur teknologi pendidikan, seperti jaringan internet yang cepat dan tersedia di sekolah-sekolah. Hal ini memungkinkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan komputer, perangkat lunak edukasi, dan akses ke sumber daya pembelajaran online, Pemerintah juga berupaya memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana alam atau kondisi yang tidak memadai.

Peningkatan kualitas guru. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru, baik melalui pelatihan dan pendidikan formal maupun dengan memberikan insentif bagi guru yang berprestasi (Bakry 2010). Kebijakan peningkatan kualitas guru merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan guru. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa guru memiliki kualitas yang tinggi dalam mengajar dan membimbing siswa. Pemerintah menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru program ini meliputi workshop, seminar, kursus, dan program sertifikasi, (Selamet dan Zaqiah 2022) pemerintah mengembangkan standar penilaian dan sertifikasi untuk mengukur kompetensi guru, pemerintah meningkatkan akses guru terhadap pendidikan tinggi meliputi program beasiswa atau subsidi untuk guru yang ingin melanjutkan pendidikan mereka dalam bidang pendidikan atau spesialisasi subjek tertentu, adanya program pembinaan dan supervisi dilakukan untuk mendukung perkembangan profesional guru dengan melalui pembinaan, guru mendapatkan umpan balik konstruktif tentang metode pengajaran mereka, strategi manajemen kelas, dan pengembangan keterampilan lainnya, pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam pengembangan profesional guru termasuk akses ke platform pembelajaran online, sumber daya digital, forum diskusi online, dan program e-learning yang membantu guru memperoleh pengetahuan baru, berbagi pengalaman, dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pendidikan, memberikan insentif termasuk kenaikan gaji dan tunjangan, bagi guru yang meningkatkan kualitas dan prestasi mereka.

Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Meskipun demikian, masih ada berbagai tantangan dan permasalahan dalam politik pendidikan di Indonesia yang perlu terus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Bukan hanya ada kebijakan politik pendidikan saja, namun kebijakan politik pendidikan islam pun tidak lepas dari adanya pengaruh pemerintah memberikan beberapa kebijakan yang dianggap sebagai upaya dalam pengenalan serta pembangunan pendidikan

Islam di Indonesia sendiri adapun beberapa kebijakan yang dicanangkan pemerintah pada masa reformasi hingga saat ini yaitu adanya inklusitas pendidikan Islam dengan pemerintah Indonesia mengakui pentingnya inklusivitas dalam pendidikan Islam, sehingga menyediakan pendidikan Islam yang dapat diakses oleh semua warga negara, tidak hanya bagi mereka yang beragama Islam, tetapi juga bagi yang beragama lain.

Pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang mencakup semua level pendidikan, dari TK hingga perguruan tinggi. Kurikulum tersebut bertujuan guna memperkuat kualitas pendidikan Islam dan mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di dunia global. Pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam merupakan upaya untuk merancang kurikulum yang memadukan pendidikan agama Islam dan mengedepankan keseimbangan pemahaman dan pengamalan agama Islam. Tujuan pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam adalah untuk membekali peserta didik dengan pendidikan yang holistik dan komprehensif dalam aspek agama, moral, budaya, dan akademik. (Supriadin 2014)

Adapun poin penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam sendiri yaitu penentuan tujuan dan visi kurikulum yang mencakup identifikasi nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin ditanamkan kepada siswa dalam aspek keagamaan, moral, dan akademik. Kemudian Integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan disiplin ilmu pengetahuan dan akademik lainnya. Pengajaran Al-Quran dan Hadis sebagai dasar pemahaman agama. (ANZAR ABDULLAH t.t.) Disamping itu kurikulum pendidikan Islam menekankan pembelajaran nilai-nilai dan etika Islam, seperti kejujuran, kesederhanaan, keadilan, belas kasihan, toleransi, dan tanggung jawab social. Selain aspek agama, kurikulum pendidikan Islam juga mencakup pengembangan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan penggunaan perangkat lunak, multimedia, sumber daya digital, dan platform pembelajaran online yang dapat meningkatkan efektivitas dan interaktifitas pembelajaran agama Islam. Kurikulum pendidikan Islam juga mempertimbangkan konteks lokal dan global dalam pengajaran dan pembelajaran.

Adanya pengembangan program pendidikan keagamaan yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat adalah langkah penting untuk membangun harmoni dan kerukunan antarumat beragama. Pengembangan program pendidikan keagamaan yang kuat dalam nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi dapat membantu membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mempromosikan pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman agama.

Kebijakan program pendidikan agama di sekolah yang diterapkan di Indonesia mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada siswa, tidak hanya pada mata pelajaran agama Islam tetapi juga pada agama lainnya. (Hasanah dan Fuhaidah 2022) Di Indonesia, kebijakan pendidikan agama di sekolah didasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “berbeda-beda namun satu”. Tujuan praktik ini adalah agar pendidikan agama di sekolah

mencakup keberagaman agama di Indonesia yang mengedepankan toleransi, saling menghargai dan pemahaman antar umat beragama. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung kebebasan beragama, mempromosikan toleransi antaragama dan mempromosikan pendidikan agama inklusif di sekolah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendidik generasi muda yang menghargai perbedaan agama dan mendorong keharmonisan masyarakat multikultural Indonesia.

Adanya penawaran pendidikan kejuruan Islam untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan Islam ini juga dirancang untuk membantu mengembangkan sektor ekonomi Islam di Indonesia. (Syaiful 2018) Terdapat penawaran pendidikan kejuruan Islam yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Program pendidikan kejuruan Islam ini dirancang untuk menggabungkan pendidikan agama Islam dengan pelatihan kejuruan dalam berbagai bidang. Mengenai Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam sekolah menengah atas yang menawarkan program pendidikan profesi keislaman pada mata pelajaran agama seperti Al Quran, Hadits, Fiqh dan Aqidah, serta mata pelajaran profesi seperti tata boga, tata busana, tata rias, dan lain-lain keterampilan. Beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia juga menawarkan program karir berbasis agama. Ada program profesional di bidang ekonomi Islam, perbankan Islam, hukum Islam, manajemen kantor Islam, dll. Kemudian ada Sekolah menengah Kejuruan Islam, lembaga pendidikan kejuruan pasca-sekolah menengah yang menawarkan program-program profesional khusus berdasarkan pendekatan Islam, mencakup mata pelajaran profesional seperti teknik mesin, teknik elektro, teknologi informasi, perawatan kesehatan dan bidang profesional lainnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan etika dalam kurikulum. Tidak kalah saing seperti pesantren lain di Indonesia, mereka juga menawarkan pelatihan kejuruan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Pemerintah Indonesia mengembangkan pendidikan Islam online untuk mempermudah akses pendidikan Islam bagi siswa di seluruh Indonesia. pendidikan Islam online sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam di seluruh negara (Hodidin 2020). Pendidikan Islam online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan platform pembelajaran yang dapat diakses secara daring. Pengembangan pendidikan Islam online memberikan kesempatan bagi siswa, guru, dan masyarakat umum untuk mengakses pendidikan Islam secara fleksibel dan interaktif. Ini juga memungkinkan penyebaran pengetahuan agama yang lebih luas dan mendukung pendidikan inklusif bagi individu yang sulit mengakses pendidikan formal.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengakui dan memperingati Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober sebagai bukti peran penting Santri dalam pelestarian dan pengembangan budaya Islam di Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mahasiswa dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial. Kebijakan adanya Hari Santri merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi pemerintah terhadap peran santri dalam membangun peradaban dan

kehidupan beragama di Indonesia. Melalui kebijakan ini, diharapkan kesadaran dan penghargaan terhadap peran santri semakin meningkat serta tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan pendidikan dan keagamaan santri di negara ini.

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan Islam. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan dalam politik pendidikan Islam di Indonesia, termasuk kurangnya dana untuk pendidikan dan perbedaan pandangan tentang pendidikan Islam di antara masyarakat.

4. Implikasi Kebijakan Politik Pendidikan Islam masa reformasi

Beberapa implikasi kebijakan politik pendidikan Islam yang diterapkan di Indonesia (Maghfuri 2020b) pada masa reformasi hingga saat ini antara lain:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Islam - Kebijakan politik pendidikan Islam yang diterapkan telah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Banyak siswa dari berbagai latar belakang sosial dan agama yang dapat mengakses pendidikan Islam yang berkualitas dan sejalan dengan tuntutan zaman.
- b. Penguatan Nilai-nilai Keagamaan dan Toleransi - Kebijakan politik pendidikan Islam juga memberikan pengaruh positif dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan toleransi di masyarakat. Dalam pendidikan Islam di Indonesia, siswa diajarkan tentang nilai-nilai agama dan moral yang universal, serta tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan.
- c. Peningkatan Kesetaraan Gender - Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga telah membantu memperkuat kesetaraan gender dalam pendidikan. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan Islam.
- d. Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing - Program pendidikan Islam kejuruan yang diterapkan oleh pemerintah juga memberikan dampak positif dalam peningkatan keterampilan dan daya saing siswa di dunia kerja. Dengan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam sektor ekonomi Islam, siswa akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi kontributor dalam pengembangan ekonomi nasional.
- e. Peningkatan Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil - Kebijakan pendidikan Islam online yang diterapkan oleh pemerintah juga memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada siswa di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Ini memungkinkan siswa yang tidak dapat mengakses pendidikan Islam secara fisik untuk tetap mendapatkan akses pendidikan Islam yang berkualitas.

Meskipun ada dampak positif dari kebijakan politik pendidikan Islam, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti kurangnya dana pendidikan, dan masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah, khususnya di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Pemerintah Indonesia masih perlu berupaya lebih keras untuk mengatasi tantangan tersebut agar dapat memperkuat pendidikan Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan secara umum.

5. Lembaga pendidikan islam masa reformasi-sekarang

Selama masa Reformasi hingga saat ini, lembaga pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Berikut adalah beberapa lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia pada masa Reformasi sampai dengan saat ini:(Didi 2020)

1. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah lembaga pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan Islam dan pendidikan umum secara terpadu. Sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan sudah terdapat sejak masa Orde Baru, namun hingga saat ini tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang banyak diminati.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) adalah lembaga pendidikan menengah atas yang menyelenggarakan pendidikan Islam dan pendidikan umum secara terpadu. Keduanya juga berada di bawah naungan Kementerian Agama dan terus berkembang hingga saat ini.
3. Pondok Pesantren Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menyediakan pendidikan dalam berbagai bidang, seperti tafsir, hadits, fiqh, dan bahasa Arab. Lembaga ini sudah ada sejak sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan tetap eksis hingga saat ini.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Universitas Islam Negeri (UIN) adalah universitas yang menyediakan pendidikan Islam dan juga pendidikan umum di tingkat perguruan tinggi. UIN didirikan pada masa Orde Baru dan hingga saat ini tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia.

Selain lembaga pendidikan di atas, saat ini juga terdapat beberapa lembaga pendidikan Islam modern yang mengusung konsep pendidikan yang lebih inovatif, seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT), Pesantren Modern Gontor, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Politik pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan sejak reformasi hingga saat ini. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk memperkuat pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pengakuan resmi lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Islam yang berkualitas. Fokus lainnya adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan Islam melalui program-program seperti beasiswa dan meningkatkan kesempatan dan infrastruktur pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam juga dirancang untuk membekali peserta didik dengan pendidikan yang bermakna dan komprehensif. Kekhawatiran lainnya adalah keterkaitan pendidikan Islam dan pendidikan umum untuk mewujudkan pendidikan yang komprehensif. Peran lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah sangat penting dalam pemeliharaan dan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengajarkan pendidikan agama tetapi juga berperan dalam membangun karakter dan moral siswa.

Penguatan masyarakat juga merupakan aspek penting dari kebijakan pendidikan Islam. Melalui partisipasi aktif masyarakat, seperti donasi finansial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan dukungan moral, pendidikan Islam dapat maju dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang terdidik dan beretika. Meskipun telah terjadi perubahan dan perkembangan yang signifikan, namun masih terdapat tantangan dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan Islam, kesenjangan ketersediaan pendidikan Islam antara perkotaan dan pedesaan, dan integrasi pendidikan agama ke dalam kurikulum utama, yang terus perlu ditingkatkan.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan Islam dan masyarakat pada umumnya. Perbaikan dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kurikulum yang lebih mutakhir merupakan langkah penting untuk memperbaiki kebijakan pendidikan Islam di masa depan. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, maka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembentukan generasi yang bermoral, berkompeten dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Referensi

- ANZAR ABDULLAH. t.t. “Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia.” Diakses 12 Juni 2023.
<https://journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/68/69>.
- Bahri, Syamsul. 2022. “Meningkatkan Kualitas Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Melalui Sumber Daya Manusia di Era Pandemi.” *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3 (1): 43–56.
- Bakry, Aminuddin. 2010. “Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.” *Jurnal Medtek* 2 (1): 1–13.
- Didi, Didi Sartika. 2020. “Manajemen Pendidikan Tinggi Islam (Upaya Mereposisi dan Merekonstruksi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Era Globalisasi).” *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 1 (2): 177–94.
- Dini, JPAU. 2021. “Lisik: Lima Pilar Kebijakan Internal Kepala RA Al Hijrah Badrul Ulum dalam Menciptakan Iklim Belajar Kondusif.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5 (2): 1915–29.
- Haerullah, Haerullah, dan Elihami Elihami. 2020. “Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal dan Non Formal.” *Jurnal edukasi nonformal* 1 (1): 199–207.
- Hasanah, Uswatun, dan Ulya Fuhaidah. 2022. “STUDENT WELLBEING DALAM PENDIDIKAN ISLAM: PANDANGAN KEDEPAN DAN TANTANGANNYA.” *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 9 (2): 104–19.
<https://doi.org/10.32923/tarbawy.v9i2.2674>.
- Hidayat, Tatang, Endis Firdaus, dan Momod Abdul Somad. 2020. “Model Pengembangan Kurikulum Tyler Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.” *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5 (2): 197–218.
- Hodidin, Muhammad Sholeh. 2020. “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 14 (1): 15–30. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.
- Huda, Miftahul. 2020. “Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Journal of Islamic Education Research* 1 (02): 39–53.
- Ikhwan, Afiful. 2017. “Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi.” *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 5 (1): 14–32.

- Indra, Hasbi. 2016. "Pendidikan Tinggi Islam dan Peradaban Indonesia." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16 (1): 109–32.
- Jannah, Miftahol, Bachtiar Adi Sautra, Aminatus Sya'adah, dan Choirul Mahfud. 2019. "Sejarah reformasi pendidikan Islam di Indonesia." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (1): 38–46.
- Khaeruddin, Khaeruddin, dan Rahmania Rahmania. 2022. "Era Reformasi: Titik Balik Pendidikan Indonesia." *Nubin Smart Journal* 2 (2): 16–25.
- Lubis, Maulana Arafat. 2020. *Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan:(PPKN) DI SD/MI: Peluang Dan Tantangan Di Era Industri 4.0*. Prenada Media.
- Lubis, Rahmat Rifai. 2021. "Universitas Islam Negeri (Studi Historisitas, Perkembangan dan Model Integrasi Keilmuan)." *Hikmah* 18 (2): 150–67.
- Maghfuri, Amin. 2020a. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8 (1): 14–26.
- . 2020b. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8 (1): 14–26. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>.
- Ma'ruf, Ahmad Ma'ruf Ahmad. 2015. "KEBIJAKAN POLITIK KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI." *Jurnal Al-Murabbi* 1 (1): 19–30.
- Mirsal, Robert. 2017. "Pembonceng Gratis Gerakan Reformasi Di Indonesia." *Jurnal Ledalero* 13 (2): 239–62.
- Purnamawati, Evi. 2020. "Perjalanan Demokrasi di Indonesia." *Solusi* 18 (2): 251–64.
- "Reformasi Indonesia (1998–sekarang)." 2023. Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformasi_Indonesia_\(1998%E2%80%93sekarang\)&oldid=23625022](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformasi_Indonesia_(1998%E2%80%93sekarang)&oldid=23625022).
- Rosyada, Dede. 2017. *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Kencana.
- Samrin, Samrin. 2015. "Pendidikan agama islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia." *Al-Ta'dib* 8 (1): 101–16.

- Selamet, Supiana, dan Q. Y. Zaqiah. 2022. “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam.” AL-MUNADZOMAH.
- Sibuea, Hotma P. 2017. “REZIM OTORITER DALAM BINGKAI KONSTITUSI DEMOKRATIS (STUDI TENTANG REZIM OTORITER di INDONESIA DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DEMOKRATIS BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA).” *Jurnal IUS CONSTITUTUM* 1 (1): 1–37.
- Supriadin, Supriadin. 2014. “POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren Dan Madrasah.” *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 8 (2): 18–41. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v8i2.250>.
- Suryana, Cecep, Aditya Tirta Lukmana, Ahmad Alwi Ray, dan Andiani Eka. 2022. “Selayang Pandang Partai Politik Antara Harapan dan Kenyataan.” Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Syaiful, Ach. 2018. “Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi.” *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2 (1): 134–54.
- Tantowi, H. Ahmad. 2022. *Pendidikan Islam di era transformasi global*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Yoga, Dyah Satya, Ni Wayan Suarmini, dan Suto Prabowo. 2015. “Peran Keluarga Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak Serta Budi Pekerti Anak.” *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)* 8 (1): 46–54. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1241>.
- Yusup, Wirastiani Binti, Bambang Ismanto, dan Wasitohadi Wasitohadi. 2019. “Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Peningkatan Akses Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama.” *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 6 (1): 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>.
- Zainuddin, Asep. t.t. “PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN KETATANEGARAAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII.”
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.